

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, pemerintah daerah memiliki produk berupa pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya itu, pelayanan publik juga dilakukan sebagai salah satu bentuk timbal balik pemerintah dari dana yang masyarakat berikan melalui pajak, retribusi, dan lain sebagainya yang merupakan sumber utama pendanaan pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dilaporkan melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), serta LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Hal ini sudah jelas harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bukti transparansi dari kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, agar tidak menimbulkan permasalahan atau keresahan di masyarakat.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi Akuntansi akan bermanfaat apabila didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami.

Dalam praktik pengelolaan keuangan tidak terlepas dari sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang menjadikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak memenuhi kriteria kualitatif yang disyaratkan oleh PP No. 71 tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari beberapa temuan BPK atas LKPD pada tahun 2017.

Tabel 1.1
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2017
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	Nilai Juta (Rp)
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan			
1.	Kerugian	2.903	1.540.604,52
2.	Potensi Kerugian	426	317.869,22
3.	Kekurangan Penerimaan	868	686.490,10
4.	Penyimpangan Administrasi	2.361	
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		6.558	2.544.963,84

(sumber : www.bpk.go.id)

Tabel 1.2
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD
Tahun 2017

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	%
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.083	34%
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.887	46%
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.252	20%
Total Kelemahan SPI		6.222	100%

(sumber : www.bpk.go.id)

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga kualitas laporan keuangan dapat sesuai dengan kriteria

kualitatif yang disyaratkan oleh PP No. 71 tahun 2010 dan tidak ada lagi temuan-temuan dari BPK yang dapat merugikan keuangan negara.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Namun masih terdapat kota yang belum memenuhi kualitas laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Hal ini terlihat dari Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI dalam 5 tahun terakhir seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Opini LKPD Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	LKPD	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2.	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kota Bekasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4.	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
5.	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
7.	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kota Sukabumi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

(sumber : www.bpk.go.id)

Berdasar tabel 1.3, dapat diketahui bahwa Kota Bandung merupakan satu-satunya kota di Jawa Barat yang memiliki opini WDP. Dampak opini WDP adalah buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini masyarakat merupakan pemberi amanah kepada jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang mana sebagian dana pemerintah ini bersumber dari masyarakat.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Seperti yang sudah diketahui bahwa Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, sudah seharusnya menjadi *role model* bagi kota lainnya yang ada di Jawa Barat. Akan tetapi Kota Bandung belum mendapatkan opini WTP sejak beberapa

tahun terakhir. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, masih terdapat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memenuhi kriteria kualitatif yang disyaratkan oleh PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah yang ada di Indonesia, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Terdapat beberapa daerah yang mendapat opini WDP bahkan TMP. Tentu hal ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan yang berdampak secara langsung terhadap opini yang dikeluarkan oleh BPK.

Hasanah dan Fauzi (2017:181) menyebutkan bahwa “Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai”. Sistem pengendalian ini meliputi tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Yusuf (2015:24) menyebutkan bahwa “Aset paling penting yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan dan harus diperhatikan dalam manajemen adalah tenaga kerja atau manusia (sumber daya manusia)”. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah untuk melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yakni laporan keuangan yang

memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

“Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis” (Krismiaji, 2010:4). Dalam hal ini penerapan sistem informasi akuntansi menjadi hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen organisasi. Luthans (2012:249) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan kinerja, seseorang yang memiliki komitmen yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dalam organisasi tersebut dan tentu dapat memengaruhi kualitas dari hasil pekerjaannya.

Dari penjelasan di atas, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (Hasanah dan Fauzi, 2017:181)
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Yusuf, 2015:24)
3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Krismiaji, 2010:4)
4. Komitmen Organisasi (Luthans, 2012:249)

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti diantaranya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Hal ini disebabkan karena faktor tersebut dapat mewakili 1 faktor lainnya yang telah disebutkan di atas, yaitu Komitmen Organisasi. Faktor komitmen organisasi merupakan variabel moderating terhadap Sumber Daya Manusia, ketika peneliti mengambil variabel Sumber Daya Manusia, maka

didalamnya terdapat komitmen organisasi yang secara tidak langsung menjadi bagian dari penelitian ini.

Hubungan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan ini diperkuat oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Sukmaningrum (2012), yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kota dan Kabupaten Semarang.

Akbar (2014) juga melakukan penelitian pada pemerintahan Kota dan Kabupaten Bandung, yang memiliki hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Akbar menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi sumber daya manusia, sistem akuntansi pemerintah, dan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Herawati (2014) dalam penelitiannya pada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang meneliti hubungan atau pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%.

Berdasarkan temuan di atas, terlihat adanya perbedaan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada setiap pemerintah daerah. Hal ini yang menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan peneliti mengambil sampel pada pemerintah daerah Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat pemerintahan dan menjadi contoh untuk kota dan kabupaten

lain yang ada di daerah Jawa Barat. Namun dalam segi penyusunan laporan keuangan Kota Bandung masih memerlukan perbaikan untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Pasalnya beberapa tahun terakhir Kota Bandung mendapat opini WDP dari BPK, hal ini menunjukkan kualitas laporan keuangan Kota Bandung belum cukup baik dijadikan sebagai contoh bagi kota dan kabupaten lainnya.

Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung” dengan harapan dapat menjadi jalan atau solusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari hasil identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung
3. Bagaimana pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung

2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara umum dapat menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung
- b. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kota Bandung, sebagai pertimbangan untuk meningkatkan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung agar opini terhadap kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik
- b. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

